

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELUARAN PEMBANGUNAN DI KOTA PALOPO

I Ketut Patra<sup>1</sup>, Nurlinda Sabani<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo  
<sup>1</sup>E-Mail: ketutpatra@stiem.ac.id

**Abstrak:** Salah satu teori yang menjelaskan perlunya pengeluaran pemerintah adalah *Publik Expenditur theory*. Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah perlu melakukan intervensi dalam perekonomian akibat adanya kegagalan pasar (*market failure*) yang menyebabkan pasar tidak dapat melakukan kegiatan terutama alokasi barang dan jasa secara efisien. Bentuk intervensi pemerintah tersebut berupa memproduksi barang dan jasa, melakukan kebijakan fiskal dan moneter, menyediakan kebutuhan masyarakat yang bersifat publik (*public goods*). Beberapa faktor yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah : jumlah penduduk, PDRB dan Tingkat inflasi mempengaruhi pengeluaran pembangunan di Kota Palopo.

Penelitian ini bertujuan menelaah lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pembangunan yang cenderung semakin meningkat di Kota Palopo, untuk dapat memberikan solusi, arah dan kebijakan pembangunan sehingga berdampak positif bagi masyarakat di Kota Palopo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis Regresi Linier Berganda yang merupakan turunan dari persamaan Cobb-Douglas.. Dengan menggunakan program SPSS. Versi 22.  $LnY = \beta_0 + \beta_1 LnX_1 + \beta_2 LnX_2 + \beta_3 LnX_3 + e$

Hasil penelitian dan uji hipotesis dengan menggunakan uji *t* dengan  $\alpha$  0,05 menunjukkan bahwa Jumlah penduduk dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pembangunan sedangkan PDRB berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pembangunan. Sementara menggunakan Uji *F* ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap pengeluaran pembangunan di Kota Palopo.

**Kata kunci:** pengeluaran Pembangunan, Penduduk, PDRB dan Inflasi

### PENDAHULUAN

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase dalam GNP yang didasarkan pada pengamatan di negara Eropa, U.S, dan Jepang pada abad ke-19. Hukum Wagner adalah ” Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat”, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Dalam hal ini mengapa peranan

pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum pendidikan, rekreasi kebudayaan dan lain sebagainya.

Lebih lanjut Peacock dan Wiseman juga mengemukakan Teori mengenai pengeluaran pemerintah yang terbaik yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena

itu meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu pula terhadap pengeluaran pemerintah.

Sementara Bird dalam Mangukoesebroto (1993) menyatakan bahwa selama terjadi gangguan sosial memang terjadi pengalihan aktivitas pemerintah dari pengeluaran sebelum gangguan ke aktivitas yang berhubungan gangguan tersebut. Hal ini akan menyebabkan kenaikan pengeluaran pemerintah dalam prosentase terhadap GNP. Akan tetapi setelah terjadi gangguan, prosentase pengeluaran pemerintah terhadap GNP perlahan-lahan akan menurun kembali pada tingkat sebelum terjadinya gangguan. Efek pengalihan merupakan gejala dalam jangka pendek, tetapi tidak terjadi dalam jangka panjang.

Dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisa faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik akan disediakan melalui anggaran belanja, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap permintaan barang yang lain.

---

**METODE DAN BAHAN**

---

Penelitian ini dilaksanakan di kota Palopo dan penelitian ini difokuskan pada factor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pembangunan di Kota Palopo. Pengumpulan data penelitian ini, lebih banyak ditekankan pada penelitian data sekunder, dimana data-data tersebut diperoleh dari kantor BPS, Bappeda, Bagian Keuangan Setda

Kota Palopo serta instansi yang terkait dalam penelitian ini.

Untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan maka dikemukakan metode analisis regresi berganda (Sugiono, 64) untuk mengetahui pengaruh/hubungan antara variable bebas (*Independent Variable*) dan Dependent Variabel, serta faktor yang dominan berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah yang diturunkan dari persamaan *Cobb-Douglas*.

$$Y = f(X)$$

$$Y = \beta_0 L X_1^{\beta_1} X_2^{\beta_2} X_3^{\beta_3} X_4^{\beta_4} X_5^{\beta_5} \dots \dots \dots X_n^{\beta_n} \quad (1)$$

Aadapun persamaan dengan mentransformasikan ke dalam Logaritma Natural (Ln) adalah sebagai berikut :

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + e \quad (2)$$

Dimana :

- Y = Pengeluaran Pembangunan
- $\beta_0$  = Konstanta
- X<sub>1</sub> = Jumlah Penduduk Kota Palopo
- X<sub>2</sub> = PDRB
- X<sub>3</sub> = Inflasi
- $\beta_1$  = Elastisitas Jumlah Penduduk
- $\beta_2$  = Elastisitas PDRB
- $\beta_3$  = Inflasi
- e = Error term

---

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

**Potensi Unggulan Daerah**

Berdasarkan kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB, struktur perekonomian Kota Palopo ditopang oleh empat sektor terbesar yakni sektor Perdagangan, Hotel & Restoran 23,64 %, Jasa-Jasa 19,42 %, Petanian 15,86 % dan Keuangan, Persewaan 15,70%, Perkembangan

presentase kontribusi sektor-sektor terhadap pembentukan PDRB Kota Palopo dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambaran perkembangan struktur ekonomi Kota

**Tabel 1:** Distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha tahun 2010 – 2014

NO	LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pertanian	21,96	18,03	17,12	15,86	19,41
2	Pertambangan & Penggalian	0,15	0,14	0,14	0,11	0,18
3	Industri Pengolahan	3,80	3,65	3,45	3,40	3,01
4	Listrik dan Air Bersih	1,65	1,71	1,73	1,80	1,00
5	Bangunan	11,29	12,11	11,01	10,74	15,96
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	20,11	21,42	22,85	23,64	21,18
7	Angkutan dan Komunikasi	8,99	9,21	9,13	9,33	5,59
8	Keuangan, Persewaan	13,12	14,16	14,94	15,70	8,22
9	Jasa – Jasa	18,92	19,58	19,64	19,42	26,17
	<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Palopo ini tidak jauh berbeda dengan struktur ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun 2013, sektor-sektor tersier merupakan sektor penopang perekonomian Sulawesi Selatan dengan menyumbang sebesar 51,17 persen terhadap total PDRB. Kemudian disusul oleh sektor primer dan sekunder secara berurutan sebesar 29,89 persen dan 18,95 persen. Sektor pertanian masih merupakan sektor penyumbang terbesar (23,90 persen) terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan

Hal tersebut sejalan dengan predikat Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra pertanian di Indonesia Timur.

Pertumbuhan riil beberapa sektor sejalan dengan kontribusi pada PDRB yang juga berpengaruh cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo antara lain sektor Listrik/gas dan Air, sektor Perdagangan, dan sektor Bank Lembaga Keuangan. Secara rinci pertumbuhan masing - masing sektor dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2:** Pertumbuhan Riil Per Sektor Kota Palopo Tahun 2010 - 2014

NO	LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Pertanian	-4,63	-8,37	5,60	3,04	6,66
2.	Pertambangan/Penggalian	-5,12	4,21	4,90	-10,57	-1,12
3.	Industri Pengolahan	4,47	5,88	5,76	6,03	5,73
4.	Listrik, Gas, Air Bersih	13,91	17,04	7,11	11,55	14,97
5.	Bangunan	9,89	17,11	-1,69	6,62	4,12
6.	Perdagangan, Restoran, Hotel	18,54	16,01	14,04	13,35	13,26
7.	Angkutan & Komunikasi	9,99	14,36	11,19	9,42	9,28
8.	Bank & Lembaga Keuangan	14,97	15,85	16,40	16,14	4,61
9.	Jasa – Jasa	5,86	7,78	3,84	4,16	5,77
	<b>PDRB</b>	<b>7,29</b>	<b>8,16</b>	<b>8,68</b>	<b>8,99</b>	<b>6,66</b>

Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kota Palopo mencapai 8,99%, pertumbuhan ini dipicu oleh kinerja positif semua sektor, kecuali sektor pertambangan dan penggalian yang berkontraksi (tumbuh negatif) sebesar 10,57%. Kinerja terbaik terjadi pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang tumbuh hingga 16,14% selain sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan negatif, sektor pertanian juga mengalami pertumbuhan terendah sebesar 3,04%.

### Pertumbuhan Ekonomi

Tiga sektor yang merupakan sumber pertumbuhan ekonomi Palopo yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor angkutan dan komunikasi. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 3,28% terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang mempunyai pertumbuhan tinggi memberikan kontribusi sebesar 2,46% sedang sektor angkutan dan komunikasi emberikan kontribusi sebesar 1,01%.

Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo tahun 2013 sebesar 8,99% mengalami percepatan pertumbuhan dibanding dengan tahun 2012 sebesar 8,68%, pemicu percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut dari sektor keuangan dan sektor perdagangan yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3:** *Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo 2010-2013*

No	Tahun	PDRB (milyar)	Pertumbuhan
1	2010	925,08	7,29
2	2011	1.000,56	8,16
3	2012	1.087,42	8,68
4	2013	1.185,21	8,99
5	2014	3.877,03	2,27
<b>Rata – rata</b>			<b>8,28</b>

Pertumbuhan ekonomi kota palopo kurun waktu 3 tahun terakhir bergerak di atas angka 8 persen. Jika pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kota Palopo mencapai 7,29 persen, dan tahun 2011 menguat sekitar 8,16 persen hingga tahun 2012 yakni sebesar 8,68 persen. Hingga Tahun 2013 masih menguat di 0,31 poin menjadi 8,99 persen.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi ini melampaui target yang menjadi salah satu sasaran strategik dalam pembangunan bidang ekonomi di daerah pada RPJMD Tahun 2008-2013 yaitu upaya untuk mempertahankan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 8 %. Sementara jika dilihat pada nilai PDRB Atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 mencapai Rp.3.081.642,00 (juta rupiah) atau meningkat sekitar 444,10 (juta rupiah) dari keadaan tahun sebelumnya 2012 yakni sebesar 2.637.545,42 (juta rupiah) nilai tambah bruto barang dan jasa yang dihasilkan meningkat hampir 7 kali lipat dibanding keadaan pada tahun 2000, hal ini terlihat dari indeks perkembangan yang mencapai 688,75 persen pada tahun 2013 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4:** Perbandingan PDRB harga berlaku dan konstan Kota Palopo Tahun 2010 – 2013

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (juta Rp)	Atas Dasar Harga Konstan (juta Rp)
2010	1.946.847,34	925.082,15
2011	2.284.801,89	1.000.569,31
2012	2.637.545,42	1.087.419,80
2013	3.081.642,00	1.185.210,25
2014	4.743.856,88	3.877.030,35

**Inflasi**

Laju Inflasi Kota Palopo (inflasi umum) dari tahun 2011 hingga tahun 2013 tercatat sebesar 5,25 dimana nilai inflasi tertinggi pada bulan Juli 2013 sebesar 2,98 sementara pada periode yang sama inflasi di beberapa Kota di Sulawesi Selatan cukup merata kecuali Kota Pare-pare 3,04 sedangkan inflasi Nasional tercatat sebesar 3,71 dan inflasi Sulawesi Selatan sebesar 3,81. Perkembangan inflasi Kota Palopo dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5:** Inflasi Umum Kota Palopo Tahun 2011 – 2013

Tahun	Inflasi	Inflasi Tertinggi	
		Bulan	Nilai Inflasi
2011	3,35	Agustus	0,90
2012	4,42	Agustus	1,14
2013	5,25	Juli	2,98

**Sosial Masyarakat**

Gambaran kondisi sosial masyarakat dapat dicermati antara lain dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angka kemiskinan. IPM merupakan indikator pokok dalam melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. IPM Kota Palopo menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 6:** Perkembangan IPM Kota Palopo 2011 - 2013

No	Tahun	IPM	IPM SUL-SEL
1.	2011	76,85	72,77
2.	2012	77,28	73,29
3.	2013	77,70	

Perkembangan IPM tersebut berkaitan erat dengan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat. Merujuk pada data tahun 2011 hingga 2013 perkembangan IPM Kota Palopo melaju lebih cepat jika dibandingkan dengan rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Selatan. IPM Kota Palopo bahkan berada pada peringkat ke tiga setelah Kota Makassar dan Pare - Pare di Sulawesi Selatan.

Perkembangan ini ditunjang oleh kebijakan sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat. Semakin terbukanya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan khususnya setelah dilaksanakannya program pendidikan gratis Propinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Kabupaten/ Kota, telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap peningkatan akses pelayanan pendidikan di tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah.

Angka rata-rata lama sekolah di Kota Palopo mengalami peningkatan, dari tahun 2011 sebesar 10,04 tahun, tahun 2012 telah mencapai 10,16 tahun, dan tahun 2013 telah mencapai 10,19. Angka ini menandakan bahwa pada umumnya

penduduk Kota Palopo telah bersekolah di atas rata-rata 10 tahun atau telah menyelesaikan pendidikan minimal di tingkat Sekolah Menengah Pertama, ini juga berarti bahwa Kota Palopo dapat dinilai telah menuntaskan wajib belajar sembilan tahun. Jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Propinsi yang pada tahun 2012 baru mencapai angka 7,10 tahun.

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah seiring sejalan peningkatan pada Angka Melek Huruf, yakni kemampuan membaca dan menulis untuk penduduk berusia 15 tahun ke atas. Jika pada tahun 2011 angka melek huruf di Kota Palopo mencapai 97,34 dan pada tahun 2013 telah mencapai angka 97,45 %, ini berarti bahwa sisa 2 % lebih dari penduduk Kota Palopo yang berusia 15 tahun ke atas yang belum dapat membaca dan menulis huruf latin, jika dibandingkan dengan angka melek huruf Sul-Sel yang pada tahun 2012 baru mencapai 87,02%.

Perkembangan jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan di Kota Palopo tahun 2011 – 2013 dapat dicermati dari pergeseran angka garis kemiskinan dan persentase jumlah penduduk miskin Kota Palopo. Kondisinya belum mengalami perubahan yang cukup berarti, jika mencermati keadaan angka kemiskinan antara tahun 2011 dan 2013 terlihat bahwa angka kemiskinan menunjukkan perubahan yang relatif baik karena menurun sekitar 0,65% yaitu dari angka 10,22% pada tahun 2011 menurun menjadi 9,57% tahun 2013 meskipun sedikit fluktuatif ditahun 2012. Hal ini menunjukkan secara umum adanya kinerja yang baik dari sinergi kebijakan dan berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan.

**Tabel 7: Persentase Kemiskinan Kota Palopo 2011 - 2013**

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase
2011	149.419	15.300	10,22
2012	152.703	14.800	9,46
2013	160.819	15.500	9,57

**Analisis Statistik**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5,158	4,485		1,150	,369
Jumlah Penduduk	,716	,364	,175	1,967	,188
PDRB	,259	,027	,810	9,629	,011
Inflasi	,025	,011	,233	2,331	,145

a. Dependent Variable: Pengeluaran pembangunan

Dari data-data yang telah disajikan di atas maka selanjutnya dapat dianalisis, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa model yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan persamaan regresi berganda yang dengan menggunakan Variabel Jumlah penduduk, PDRB dan Inflasi dengan parameter :  $b_1, b_2, b_3, \epsilon = 5\%$ . Berikut ini adalah persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 5,158 + 0,716 X_1 + 0,259 X_2 + 0,025 X_3$$

Dari persamaan tersebut di atas memberikan pengertian sebagai berikut :

$B_0 = 5,158$  menunjukkan bahwa tanpa adanya penambahan variabel  $X_1$  (Jumlah Penduduk),  $X_2$  (PDRB)  $X_3$  (Inflasi)

maka besarnya pengeluaran Pembangunan pemerintah Kota Palopo mengalami kenaikan sebesar 5,158 persen.

$B_1 = 0,716 X_1$  ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan jumlah penduduk 1 persen maka berkonsekwensi menaikkan Pengeluaran Pemerintah sebesar 71,6 persen di Kota Palopo.

$B_2 = 0,259 X_2$  menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan PDRB 1 persen berpengaruh terhadap kenaikan Pengeluaran pembangunan sebesar 25,9 persen.

$B_3 = 0,025 X_3$ , artinya setiap kenaikan inflasi 1 persen berpengaruh terhadap pengeluaran pembangunan pemerintah Kota Palopo sebesar 2,5 persen.

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,995 <sup>a</sup>	,989	,974	,03671

a. Predictors: (Constant), Inflasi, PDRB, Jumlah Penduduk

Nilai  $R^2$  Adjusted sebesar = 0,974 ini menunjukkan bahwa 97,4% variansi variabel Pengeluaran Pembangunan pemerintah Kota Palopo dipengaruhi faktor jumlah penduduk, PDRB Kota Palopo dan inflasi, sedangkan selebihnya 2,6 persen dipengaruhi faktor lain di luar model ini dengan nilai sebesar  $R^2$  sebesar 97,4% berarti variabel yang digunakan dalam model tersebut valid untuk memprediksi perubahan pengeluaran pemerintah di Kota Palopo, dari analisis tersebut diperoleh nilai r sebesar 0,995 atau 99,5 persen. Ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk, PDRB Kota Palopo dan inflasi memiliki korelasi yang sangat

kuat terhadap pengeluaran pembangunan di Kota Palopo.

Dengan menggunakan uji t (uji parsial) dengan tingkat kepercayaan 95% = Variabel penduduk diperoleh lever signifikan  $0,188 > \epsilon 0,05$  dengan demikian jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pengeluaran pembangunan pemerintah Kota Palopo dapat digunakan untuk memprediksi perubahan pengeluaran pemerintah. Hasil tersebut sejalan dengan Teori *Nelson* dan *Leibenstein* (Sukirno ; 2006) mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat pada negara sedang berkembang menyebabkan kesejahteraan ekonomi masyarakat tidak mengalami perbaikan

yang berarti dan dalam jangka panjang mungkin menurun. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat mengharuskan pemerintah untuk melakukan penanaman modal yang lebih besar untuk pendidikan selanjutnya menimbulkan keharusan untuk mempercepat pengembangan fasilitas-fasilitas yang diperlukan guna memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat.

Nick Devas 1989 dalam Mubyarto (2000) pertumbuhan penduduk memperlambat pembentukan modal. Jika penduduk meningkat pendapatan perkapita masyarakat menurun, berarti bagian besar pendapatan terpakai untuk pengeluaran konsumsi. Tabungan yang sudah rendah menjadi semakin rendah, yang akibatnya investasi semakin rendah. Kenaikan jumlah penduduk juga mengakibatkan pengalihan investasi modal dari kegiatan produktif langsung pada modal *ever head social*.

Nilai t untuk variabel PDRB dengan tingkat kepercayaan 95% =  $t_{0,05}$  diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,011 < 0,05$  dengan demikian PDRB Kota Palopo berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pembangunan pemerintah Kota Palopo.

Sedangkan nilai t untuk variabel tingkat inflasi dengan tingkat kepercayaan 95% =  $t_{0,05}$  = diperoleh level signifikansi  $0,145 > 0,05$  ini berarti bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pembangunan pemerintah Kota Palopo.

Akan tetapi dengan menggunakan uji F 5% dan 1% (menguji secara simultan) ketiga variabel tersebut Jumlah penduduk, PDRB Kota Palopo dan inflasi berpengaruh secara signifikan karena

$t_{0,05} > \text{level sig } 0,016$ . (Tjiptoherijanto ; 2003) Penduduk sangat berperan dalam menjalankan suatu pembangunan daerah, karena aspek penduduk selalu menjadi tolak ukur pembangunan karena penduduk disini adalah sebagai obyek sekaligus menjadi subjek dalam setiap pengambilan keputusan suatu perencanaan. Sebagai subyek pembangunan penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan dan sebaliknya pembangunan harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Pembangunan baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang lebih luas.

Pengujian selanjutnya adalah mencari variabel yang paling dominan, dilakukan dengan cara mencari nilai koefisien terstandarisasi (beta) menurut Sirtua Arief (Sutikno, 2007) variabel bebas yang memiliki nilai koefisien yang paling tinggi merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi variabel terikat. Dari hasil pengolahan data ternyata variabel PDRB Kota Palopo mempunyai koefisien yang paling tinggi (0,810) dengan demikian PDRB mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap pengeluaran pembangunan pemerintah Kota Palopo.

---

## SIMPULAN

---

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: (1) Setiap kenaikan jumlah penduduk 1 persen maka berkonsekwensi menaikkan Pengeluaran Pemerintah sebesar 71,6 persen di Kota Palopo. (2) Setiap kenaikan PDRB 1 persen berpengaruh terhadap kenaikan Pengeluaran pembangunan sebesar 25,9 persen. (3) setiap kenaikan inflasi 1

persen berpengaruh terhadap pengeluaran pembangunan pemerintah Kota Palopo sebesar 2,5 persen. (4) Dengan menggunakan uji t (uji parsial) dengan tingkat kepercayaan 95% = Variabel penduduk diperoleh lever signifikan  $0,188 > \alpha_{0,05}$  dengan demikian jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pengeluaran pembangunan pemerintah Kota. (5) Nilai t untuk variabel PDRB dengan tingkat kepercayaan 95% =  $\alpha_{0,05}$  diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,011 < 0,05$  dengan demikian PDRB Kota Palopo berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pembangunan pemerintah Kota Palopo. (6) Sedangkan nilai t untuk variabel tingkat inflasi dengan tingkat kepercayaan 95% =  $\alpha_{0,05}$  diperoleh level signifikansi  $0,145 > 0,05$  ini berarti bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pembangunan pemerintah Kota Palopo. (7) Akan tetapi dengan menggunakan uji F 5% dan 1% (menguji secara simultan) ketiga variabel tersebut Jumlah penduduk, PDRB Kota Palopo dan inflasi berpengaruh secara signifikan karena  $\alpha_{0,05} > \text{level sig}$  0,016. (8) PDRB mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap pengeluaran pembangunan pemerintah Kota Palopo.

---

#### DAFTAR PUSTAKA

---

- Arsyad. 1999, *Ekonomi Pembangunan*, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Boediono. 1981. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi, No. 4 BPFE UGM, Yogyakarta
- Devarajan, S.,S. Vinaya and H Zou 1996. The *Composition of Public Expenditures and Economic Growth*, *Jurnal of Monetary Economic*, 37, 313-344.
- Djoyohadikumo, Sumitro, 1994, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi, Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, LP3ES Jakarta.
- Gani Formulsi DAU, Judicial Reviu atau Tidak: Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda
- Guo Xin. Jianjun Miao and Erwan Morellec. 2004. *Irreversible Investment With Regime Shifts*. *Jurnal Of. Economic theory*. Available online at [www.scinedirect.com](http://www.scinedirect.com)
- Hanson, P. And M Herekson, 1994. *A New Framework for Testing the Effect of Government Spending on Growth and Produktivity Public Choice*, 81, 381-401
- Haziarah, 2004. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta terhadap tenaga Kerja di Balik Papan*. Tesis tidak diterbitkan. Makassar. Unhas.
- Jaya. 2004. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Alokasi anggaran Pembangunan di Propinsi Sulawesi - Selatan, Tesis Pasca Unhas
- Kunarjo. 1996. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta UI Press
- Lanjouw, et.al. 2001. *Fundamental of Finance Management*. Seventh Edition. The Dryden Press Harcourt Brace College Publishers. Orlando - USA.
- Mambo Apakah Kapasitas Fiskal di Daerah Mampu Membiayai Pelayanan Publik <http://psekp.ugm.ac.id> - Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM (CEPPS)
- Maryani, 2002. *Penengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Untuk Menciptakan Kesempatan Kerja di Kota Makassar*. Tidak dipublikasikan. Makassar. Unhas
- Nanga, Muana. 2001. *Makroekonomi, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Rajawali Pers. Jakarta.

- Palley, Thomas I, 1996, Growth Teory in A Keynesian model some Kyenesian Fundation For New Endogenous Growth Theory, Jurnal of Post Keynesian Economics, Vol. 19 No.1
- Rahardja. P, Mandala Manurung.2001. *Teori Ekonomi Makro*. FEUI. Jakarta.
- Rasman. 2003 *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Alokasi pengeluaran Pembangunan di Kota Samarinda*, Tesis Pasca Unhas
- Salim, Emil. 1989. *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendidikan*. UI Press. Jakarta.
- Sagir, Suharsono. 1982. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Ilmu Ekonomi SDM*. LPFE-UI. Jakarta.
- Samuel. 1986. *Administrasi Pembangunan*. Cetakan Pertama. PT. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.
- Satriyo, 2003 Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Alokasi anggaran Pembangunan di Propinsi Kalimantan timur, Tesis Pasca Unhas
- Sugiono, 2002. *Statistik Untuk Penelitian*, CV. Alfa Beta .Bandung
- Suparmoko.2003. *Keuangan Negara Dalam teori dan Praktek*. BPFE Yogyakarta
- Simanjuntak, Payaman. 1985. *Pengantar Ilmu Ekonomi SDM*. LPFE-UI. Jakarta.
- S.Mulyadi, 2003 . *Ekonomi Sumber Daya Manusia (Dalam Persepektif Pembangunan)* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekertawi. 1993. *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian*. Rajawali Press. Jakarta.
- Soeroto. 1992. *Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*. UGM. Yogyakarta.
- Syarir. 1995. *Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi*. PT. Media Widya Mandala.Jakarta
- Tambunan, Tulus T.H., 2001, *Perekonomian Indonesia Beberapa masalah Penting*, Ghalia, Indonesia
- Tjipto. P 2003. *Kependudukan Birokrasi dan reformasi Ekonomi (Pemikiran dan Gagasan Masa Depan Pembangunan)*. Rineka Cipta. jakarta
- Todaro. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga. Jakarta.